

KARYA ILMIAH

**PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENTING DALAM
UPAYA PENINGKATAN KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN PEDESAAN**

OLEH

DRS. ARIE J. RORONG, MSI

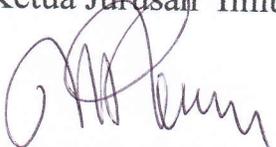


**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
MANADO
2013**

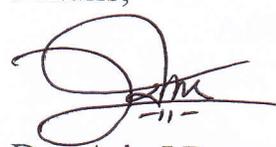
LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

a. Nama : Drs. Arie J. Rorong, MSi
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP : 196108101990031004
d. Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tkt. I, IV/b
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
f. Jurusan : Ilmu Administrasi
g. Program Studi : Administrasi Publik
h. Judul Karya Ilmiah : Pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pembangunan pedesaan

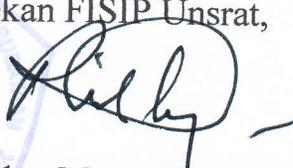
Menyetujui :
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi,

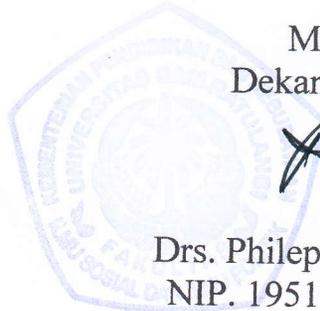

Dra. Mieke Roring, MH.-
NIP.195303041988032001.-

Penulis,


Drs. Arie J. Rorong, MSi.-
NIP. 196108101990031004.-

Mengetahui :
Dekan FISIP Unsrat,


Drs. Philep Morse Regar, MS.-
NIP. 195105031983031002.-



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkat dan penyertaanNya maka penulisan karya ilmiah ini Dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan

Karya Ilmian ini diberi judul : Pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pembangunan pedesaan.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan , oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaannya.

Semoga karya ilmiah ini akan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai salah satu bahan untuk referensi mereka yang membutuhkannya.

Penulis,

AJR

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B.Permasalahan.....	3
C.Sistematikan.....	4
BAB II.LANDASAN TEORI	
A.Pembangunan.....	6
B.Pembangunan Desa.....	7
C.Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	9
BAB III.PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA	
A.Indikator Keberhasilan Pembangunan.....	11
B.Pembangunan Pedesaan dan Nilai Keberhasilannya.....	28
C.Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pedesaan untuk Peningkatan Keberhasilan Pembangunan.....	23
BAB IV.KESIMPULAN.....	30
DAFTAR PUSTAKA	

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut "Sumber Daya" atau "Resources", baik yang berupa sumber daya alam (natural resources) maupun sumber daya manusia (human resources). Ketersediaan kedua jenis sumber daya tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Walaupun kedua jenis sumber daya itu penting, namun sumber daya manusia yang paling penting dalam pembangunan, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas.

Kuantitas (jumlah) sumber daya manusia yang besar memang merupakan modal dasar usaha pembangunan. Akan tetapi jumlah sumber daya manusia yang besar tanpa disertai dengan mutu (kualitas) yang memadai hanya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, untuk berhasilnya usaha-usaha pembangunan maka pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu prasyarat utama.

Pentingnya kualitas sumber daya manusia untuk berhasilnya pembangunan dapat diamati dari kemajuan-kemajuan bangsa-bangsa di dunia. Sebagai contoh, Jepang dan Korea Selatan yang cukup miskin akan sumber daya alamnya tetapi karena usaha-usaha pengembangan kualitas sumber daya manusianya begitu hebat, maka kedua negara ini dapat kita saksikan sebagai negara yang berhasil dalam pembangunannya. Sebaliknya, negara-negara yang potensial dan kaya akan sumber daya alamnya seperti

kebanyakan negara-negara di kawasan Timur Tengah, tetapi karena kurang memperhatikan pengembangan kualitas sumber daya manusianya maka kemajuan negara-negara ini kalah dengan negara-negara seperti Jepang, Korea dan Hongkong. (Harian Kompas 28 April 1997).

Kualitas sumber daya manusia yang rendah memang merupakan fenomena umum di negara-negara sedang berkembang, dan merupakan masalah pokok dalam usaha percepatan keberhasilan pembangunan di negara-negara ini. Indonesia sebagai negara yang tergolong sedang berkembang, juga memiliki permasalahan yang sama dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Sesuai laporan UNDP Tahun 1996, Indonesia menduduki urutan ke-102 (dilihat dari ukuran Human Development Index atau (HDI) diantara negara-negara di dunia. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia seperti negara Jepang yang menduduki urutan ke-3, Hongkong urutan ke-22, dan Korea Selatan urutan ke-29; maka Indonesia masih sangat ketinggalan dalam kualitas sumber daya manusianya (Harian Kompas 28 April 1997).

Dengan kondisi yang demikian itu sehingga pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang besar. Memang sejak awal dasawarsa tahun 1970-an upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia mulai memperoleh perhatian di dalam kerangka pembangunan di negara ini. Bobot perhatian terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia tersebut semakin nampak terutama dasawarsa 1980-an dan 1990-an, sebagaimana dapat dilihat dari Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN tahun 1993 misalnya dinyatakan bahwa titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi

yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia...(GBHN, 1993). Namun dengan melihat data yang dikemukakan oleh UNDP di atas, maka usaha-usaha pengembangan kualitas sumber daya manusia di negara ini masih perlu ditingkatkan, agar pembangunan bisa lebih berhasil.

B. Permasalahan

Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang rendah sangat dirasakan di daerah pedesaan. Beberapa indikator yang dapat menunjuk kepada hal tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan formal sebagian besar masyarakat desa, tidak adanya atau sangat kurangnya pendidikan nonformal yang terlihat dari kurangnya keterampilan, derajat kesehatan dan mutu harapan hidup masyarakat yang rendah, kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan yang masih memprihatinkan, keterbatasan pola berfikir modern yang masih menonjol dan sebagainya.

Kondisi kualitas sumber daya manusia di pedesaan yang demikian itulah yang menyebabkan lemahnya kemampuan masyarakat pedesaan untuk mempengaruhi atau membangun masa depan mereka yang lebih baik sesuai yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.

Sesuai dengan konsepsinya bahwa pembangunan desa itu penekanannya adalah pada prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Pretensi ini sulit terwujud sebagaimana mestinya karena lemahnya kemampuan masyarakat sebagai dampak dari lemahnya atau rendahnya kualitas sumber daya pada masyarakat pedesaan. Oleh karena itu agar usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk membangun masa depan mereka

yang lebih baik dapat berhasil, maka pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan mutlak dilaksanakan secara terarah,

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka Karya Ilmiah ini mencoba menguraikan pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan dihubungkan dengan upaya peningkatan keberhasilan pembangunan di pedesaan, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan konsep-konsep ataupun strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan keberhasilan pembangunan di pedesaan.

C. Sistematika

Sesuai dengan lingkup permasalahan yang telah dikemukakan, Hal ini dibagi dalam empat bab.

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Seperti yang telah diuraikan, bab ini mengemukakan secara umum lingkup permasalahan yang hendak dikaji/dibahas.

Bab kedua merupakan bab landasan teoritis yang mengetengahkan tentang, konsep pembangunan secara umum, konsep pembangunan desa dan konsep pengembangan sumber daya manusia/

Selanjutnya bab ketiga merupakan bab inti atau bab pembahasan yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: pada bagian pertama diuraikan tentang indikator-indikator keberhasilan pembangunan pada umumnya. Bagian kedua dari bab tiga ini menguraikan secara khusus mengenai pembangunan desa (pedesaan) dan nilai keberhasilan sebagai tolok ukur indikatornya. Bagian

ketiga membahas tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan untuk peningkatan keberhasilan pembangunan. Pada bagian ini diuraikan dua hal, yaitu pertama mengenai Aspek pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan dan yang kedua aspek kesehatan.

Kemudian pada bab keempat adalah sebagai bab penutup, dimana pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan pokok dan beberapa implikasi penting yang ditarik dari tulisan ini.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pembangunan

Pembangunan (development) merupakan suatu fenomena yang bermuka banyak (multifaceted). Ia memancing pertanyaan-pertanyaan sulit tentang nilai-nilai, teknik-teknik dan pilihan-pilihan. Pembangunan memunculkan kembali pertanyaan klasik tentang hakekat "masyarakat yang baik", dan juga masalah siapakah yang harus menentukan isi dan tujuan masyarakat. Karena masalah-masalah itu luas dan sulit, mudahlah orang mengaburkannya dalam generalisasi, menggunakan istilah pembangunan sebagai eufimisme untuk perubahan, modernisasi, pertumbuhan dan lain sebagainya (Bryant dan White, 1987).

Dalam pengertian pada umumnya, pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi/kondisi nasional yang satu (one state of national being) ke situasi/kondisi nasional yang lain yang dinilai lebih baik (Saul Kantz, 1971); dengan kata lain pembangunan pada dasarnya menyangkut proses perbaikan (Seers, dalam Tjokrowinoto, 1987).

Selanjutnya menurut Beratha (1982:72) bahwa pembangunan itu tidak lain adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan tersebut direncanakan dengan mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Kemudian oleh Tjokroamidjojo sendiri (1978:222) merumuskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

R.P. Mizra (dalam Khairuddin, 1992;23) mendefinisikan pembangunan pada dasarnya adalah usaha manusia dan untuk memahami pembangunan tersebut dibutuhkan usaha-usaha yang terpadu dari seluruh sistem pengetahuan, baik fisik, biologi, sosial maupun tentang manusia.

Mengacu pada konsepsi atau beberapa definisi tentang pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu kegiatan, usaha, proses dan tindakan secara sadar yang dilakukan secara terus menerus untuk merubah kondisi serta keadaan yang tadinya terkebelakang dan tradisional, kearah yang lebih baik, maju dan modern.

B. Pembangunan Desa

Beberapa sumber referensi yang berkaitan dengan studi pembangunan desa, sering ditemui berbagai istilah yang mengidentikan dengan pembangunan desa, seperti pembangunan masyarakat (community development), pembangunan pedesaan (rural development). Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya adalah sama, karena yang dimaksudkan adalah pembangunan masyarakat pedesaan yang secara umum dan populer disebut pembangunan pedesaan atau pembangunan desa.

Istilah pembangunan di pedesaan perlu ditarik perbedaannya dengan pembangunan desa. Pembangunan di pedesaan adalah bentuk-bentuk pembangunan nasional yang berlokasi di desa, sedangkan yang dimaksudkan dengan pembangunan desa adalah pembangunan desa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa pembangunan masyarakat (dalam Ndraha Taliziduhu, 1990).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1984 telah mengkonsepsikan pembangunan desa, yaitu suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan dari masyarakat desa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan kepada kemajuan nasional (dalam Taliziduhu, 1987). Selanjutnya menurut ahli T.R. Betten (1960) menyetujui konsep tersebut dengan mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat desa itu adalah suatu proses dimana masyarakat desa membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, kemudian merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya.

Kemudian dalam pola gerak operasional pembangunan desa (menurut SK Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 1969), ditegaskan bahwa pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus secara sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh (Dalam Beratha, 1982).

Dari pengertian di atas, apabila ditinjau dari sudut pandang proses, pembangunan desa pada hakekatnya merupakan proses perubahan mental dari sesuatu tatanan hidup menuju tatanan hidup yang dianggap lebih baik. Proses perubahan mental yang demikian pada dasarnya digerakkan oleh sesuatu kegiatan tertentu dan yang menjadi penyebab gerakan tersebut adalah manusia, karena manusialah yang memiliki seperangkat gagasan, keterampilan-keterampilan tertentu.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu konsep yang mengandung dimensi sangat luas. Secara umum sumber daya manusia diartikan sebagai daya yang bersumber pada manusia yang dapat berupa tenaga (energi) ataupun kekuatan (power). Tenaga dan kekuatan yang bersumber dari manusia itu dapat berupa ide, ilmu pengetahuan, endapan pengalaman, dan lain-lain yang berupa potensi fisik, moral, dan intelektual yang berwujud dalam bentuk pendidikan, keterampilan, kesehatan dan lain-lainnya (Magnum, dalam Soeroto, 1986).

Notoatmodjo (1992) mengemukakan bahwa berbicara masalah sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menyangkut "kuantitas" dan "Kualitas", kuantitas adalah menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia juga menyangkut dua aspek yakni aspek fisik (kualitas fisik), dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diarahkan kepada dua aspek tersebut. Upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kedua aspek tersebut inilah yang dimaksudkan dengan "pengembangan sumber daya manusia".

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sumber daya manusia itu pada dasarnya mengandung pengertian sebagai daya (energi) dan kekuatan (power) yang bersumber pada

- manusia, yang dapat berupa ide-ide, ilmu pengetahuan, endapan pengalaman dan lain-lain berupa potensi fisik, moral dan intelektual;
- 2) Bahwa pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan mutu atau kemampuan manusia baik dalam arti mutu/kemampuan fisik maupun nonfisik yang memperbesar kemampuan memperbaiki hidup bagi diri sendiri dan bagi orang lain;
 - 3) Bahwa pengembangan sumber daya manusia meliputi aspek yang luas, terutama dalam aspek-aspek kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan gizi, peningkatan keterampilan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain adalah semua usaha/upaya untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas hidupnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia.

BAB III

PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI PEDESAAN

A. Indikator Keberhasilan Pembangunan

Masalah pembangunan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun atau negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara ini dengan kata lain sedang dalam proses perubahan besar yang mencakup berbagai aspek yaitu tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek-aspek lain seperti aspek politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Karena luasnya dimensi-dimensi pembangunan itulah sehingga nilai ataupun indikator keberhasilan suatu pembangunan juga menjadi sangat luas.

Menurut pandangan atau pendekatan pembangunan ekonomi klasik (aliran klasik) bahwa keberhasilan pembangunan itu ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi atau perbaikan taraf hidup yang terus menerus yang tercermin pada kenaikan pendapatan nasional (GNP) yang pendapatan perkapita secara nyata serta kumulatif (Moeljarto Tjokrowinoto, 1987). Dengan kata lain bahwa tujuan pembangunan menurut pendekatan ekonomi murni ini ialah pencapaian pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya (Bintoro Tjokroamidjojo, 1984), sedangkan bidang-bidang lain diharapkan dapat dipecahkan melalui trickle down effect (efek tetesan) dari hasil sampingan pertumbuhan itu sendiri (Tjokrowinoto, 1987). Jadi nilai pembangunan menurut pendekatan ini sama dengan "pertumbuhan" atau menurut Bryant dan Whit

(1987) sinonim dengan "industrialisasi dan produktivitas". Dimana dengan menempuh industrialisasi dan penanaman modal, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan akan dicapai secara otomatis sebagai akibat dari trickle down dari suatu pusat yang dominan.

Konsep indikator keberhasilan pembangunan model ekonometrik ini mendapat banyak kritikan karena dinilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar rakyat lapisan bawah. Para pengkritik kemudian menambah indikator lain di samping indikator ekonomi murni, yang disebut dengan "indikator sosial" yang mencakup antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya (Tjokrowinoto, 1987).

Salah satu konsep ukuran keberhasilan pembangunan menurut pendekatan indikator sosial ialah apa yang dikenal dengan PQLI (Physical Quality of life Index), yang mencakup : angka kematian bayi (infant mortality rate), harapan hidup pada bayi berumur satu tahun (life expectancy at age one), dan tingkat kemampuan membaca dan menulis atau basic literacy (Moris, dalam Moejarto Tjokrowinoto, 1987).

Pendekatan lain yang menekankan pada indikator sosial ialah apa yang dikenal dengan "pendekatan Kebutuhan Pokok" (Human Needs Approach atau Basic Human Needs). Bidang permasalahan dalam pendekatan ini antara lain meliputi bidang-bidang seperti : makanan, nutrial, lapangan kerja, kesehatan, perumahan, pendidikan, komunikasi, kebudayaan, penelitian dan teknologi, energi, hukum, dinamika politis dan implikasi ideologi (Soejatmoko, dalam Tjokroamidjojo, 1987). Sedangkan menurut konsep ILO (International Labour Organization) bahwa konsep kebutuhan pokok itu meliputi dua bidang utama,

yaitu : (1) konsumsi minimum keluarga seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan dan (2) pelayanan publik (public service) untuk rakyat pada umumnya, seperti sumber air bersih, transportasi, listrik, dan sebagainya (Tjokrowinoto, 1987).

Konsep lain mengenai ukuran keberhasilan pembangunan juga dikemukakan oleh para tokoh-tokoh paradigma neo-ekonomi. Salah seorang tokoh aliran neo-ekonomi bernama Dudley Seers mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan dapat diukur dari tiga tolok ukur yaitu : (1) seberapa jauh pembangunan berhasil menurunkan/memberantas kemiskinan, (2) seberapa jauh pembangunan berhasil menurunkan/memberantas pengangguran, dan (3) seberapa jauh pembangunan berhasil menurunkan/memberantas ketimpangan. Dijelaskannya, bahwa keberhasilan menurunkan kemiskinan diukur dari seberapa jauh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan. Keberhasilan menurunkan pengangguran diukur dari apakah orang yang menganggur dan setengah menganggur berkurang. Sedangkan keberhasilan menurunkan ketimpangan diukur dari Index Gini atau Gini Ratio (dalam Tjokrowinoto, 1987). Ukuran keberhasilan pembangunan dari aspek Index Gini ini beroleh perhatian besar sekitar tahun 1970-an yaitu dengan munculnya pendekatan pembangunan "pertumbuhan dengan pemerataan", yakni suatu pendekatan pembangunan yang menghendaki pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangunan disegala bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lainnya dalam rangka perbaikan atau peningkatan taraf hidup dari sebagian besar rakyat berpenghasilan rendah di dalam suatu masyarakat (Bintoro Tjokroamidjojo, 1982).

Selain konsep-konsep pengukuran di atas, tolok ukur lain dari suatu keberhasilan pembangunan adalah dengan mengukur Human Development Index (HDI) yaitu suatu metode mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. HDI merupakan konsep baru dalam pengukuran keberhasilan pembangunan yang dikembangkan sejak tahun 1985. Meskipun dari tahun ke tahun HDI ini mendapatkan penekanan yang berbeda, namun intinya HDI mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki tiap-tiap individu untuk dapat berpartisipasi di masyarakat. Kemampuan dasar tersebut antara lain menyangkut kemampuan untuk dapat mencapai hidup yang panjang dan sehat, kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka hidup yang layak. Human Development Index (HDI) ini mencakup tiga komponen, yaitu : (1) angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth), (2) tingkat pendidikan (educational attainment), dan (3) kemampuan daya beli masyarakat atau income. Nilai HDI tiap-tiap negara menunjukkan seberapa jauh langkah yang harus dilalui negara itu untuk dapat mencapai tujuan sosialnya (dalam Moejarto dan Prabowo, 1997).

Dari uraian singkat di atas nampak bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan itu tidak hanya semata-mata dilihat pada peningkatan pendapatan nasional (GNP) ataupun peningkatan pada pendapatan income percapita, tetapi juga mencakup peningkatan pada bidang-bidang lainnya. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas maka setidaknya-tidaknya beberapa tolok ukur keberhasilan pembangunan itu adalah:

- (a) Peningkatan dalam Pendapatan Nasional atau GNP (Growth National Product) ataupun PDRB (Product Domestic Regional Brutto),

- (b) Peningkatan dalam pendapatan masyarakat (Income Percapita),
- (c) Perkembangan Tingkat Pemerataan (Gini Ratio atau Index Gini),
- (d) Peningkatan dalam tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang tercermin pada peningkatan physical Quality of Life Index (PQLI), ataupun peningkatan dalam Human Development Index (HDI).

Peningkatan dalam GNP dan Income Percapita adalah merupakan indikator atau tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam ukuran ekonomi (indikator ekonomi), PQLI dan HDI merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan dilihat dari ukuran atau indikator sosial yaitu mengukur kesejahteraan individu dalam masyarakat yang meliputi aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, kemampuan daya beli, dan lain sebagainya.

B. Pembangunan Pedesaan dan Nilai Keberhasilannya

Pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral daripada pembangunan nasional suatu bangsa/negara. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa akan turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional demikian pula keberhasilan pembangunan nasional harus dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat hingga ketingkat pedesaan.

Sejalan dengan konsep pembangunan desa yang sudah dikemukakan pada bab di muka, jelas bahwa penekanannya adalah masyarakat desa yaitu kepada perbaikan/peningkatan kondisi hidup masyarakat, sehingga mereka mampu membangun masa depan mereka dan memberi sumbangan (berpartisipasi) kepada kemajuan nasional. Oleh karena itu keberhasilan

pembangunan desa atau pembangunan masyarakat pedesaan dapat diukur dari kemajuan-kemajuan atau peningkatan pada aspek-aspek tersebut. Secara rinci Ndraha Taliziduhu (1987) mengemukakan indikator atau tolok ukur keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaan tersebut pada tiga aspek pokok, yaitu:

- 1) Sejauhmana kondisi dan taraf hidup masyarakat berhasil diperbaiki dan ditingkatkan;
- 2) Sejauhmana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat atau berhasil digerakkan; dan
- 3) Sejauhmana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil ditumbuhkan.

Ketiga tolok ukur atau indikator keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaan tersebut secara singkat diuraikan sebagai berikut:

(1) Taraf Hidup

Taraf hidup merupakan suatu konsep yang mengandung pengertian yang sangat luas. Sebagian orang mengidentifikasikannya dengan tingkat kesejahteraan individu ataupun masyarakat. Ada juga yang mengartikan taraf hidup sebagai suatu konsep yang menunjukkan nilai atau prestasi seseorang atau sekelompok orang terhadap pemenuhan kebutuhan hidup; dengan kata lain menurut pengertian ini taraf hidup seseorang/sekelompok orang nampak dari tinggi-rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Tolok ukur atau indikator yang banyak dipakai untuk mengetahui taraf hidup ialah dengan mengukur besarnya tingkat pendapatan (income) baik berupa barang maupun uang. Pendapatan berupa uang ialah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan diterima, biasanya sebagai

balas jasa atau kontraprestasi seperti gaji/upah, dan lain-lain balas jasa seperti pendapatan dari penjualan barang yang dipelihara, hasil investasi dan sebagainya. Sedangkan pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang dan jasa (Mulyanto, 1985). Berdasarkan tolok ukur ini maka akan mendapat tiga golongan masyarakat menurut pendapatannya, yaitu : golongan masyarakat yang taraf hidup mereka tinggi, golongan menengah, dan golongan rendah. Bank Dunia (1990) telah menetapkan batas-batas besar pendapatan untuk masyarakat di negara-negara berkembang sebagai berikut: (1) Golongan berpendapatan tinggi adalah yang berpendapatan lebih dari US \$ 1600 pertahun; (2) Golongan berpendapatan sedang adalah yang berpendapatan rata-rata antara US \$ 400-1600 pertahun; dan (3) Golongan berpendapatan rendah adalah yang berpendapatan kurang dari US \$ 400 pertahun. (dalam Subiati, 1993).

Tolok ukur lain yang juga sering dipakai untuk mengukur taraf hidup ialah melihat dari segi tingkat kemiskinan dengan melihatnya dari ukuran beras. Menurut ukuran ini bahwa untuk Desa yang tergolong paling miskin adalah yang berpendapatan 180 Kg beras pertahun; miskin sekali adalah berpendapatan 240 Kg beras pertahun; dan miskin adalah berpendapatan 320 Kg beras pertahun. (Sayogya, dalam Mulyanto, 1987).

Selain ukuran-ukuran di atas, ada juga yang mengukur taraf hidup dari segi tingkat kesejahteraan keluarga. BKKBN dalam hal ini mengkonsepsikan tingkat kesejahteraan keluarga atas 5 golongan, yaitu :

- (1) Keluarga Prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar/pokok secara minimal;

- (2) Keluarga Sejahtera-I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya seperti pendidikan, interaksi dalam masyarakat, dan sebagainya;
- (3) Keluarga Sejahtera-II, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangan seperti menabung, memperoleh informasi dan sebagainya;
- (4) Keluarga Sejahtera-III, yaitu yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan perkembangannya, tetapi belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat seperti memberikan sumbangan dalam bentuk materil dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, pendidikan dan sebagainya;
- (5) Keluarga Sejahtera III-Plus, yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan psikologis, kebutuhan perkembangannya, dan secara teratur telah dapat memberikan sumbangan kepada kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, dan sebagainya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tolok ukur taraf hidup itu tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan semata-mata, tetapi mencakup tingkat kesejahteraan pada semua aspek kehidupan baik dalam hal taraf ekonomi keluarga, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan masyarakat pedesaan antara lain akan nampak pada peningkatan pada semua aspek-aspek kesejahteraan tersebut.

(2) Partisipasi Dalam Pembangunan

Meningkatkannya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan merupakan indikator kedua dari keberhasilan pembangunan pedesaan.

Partisipasi masyarakat dihubungkan dengan suatu program pembangunan, merupakan dua faktor yang saling berkaitan dan sulit dipisahkan. Karena berbicara mengenai keberhasilan suatu program pembangunan tergantung dari sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pembangunan tersebut.

Partisipasi pembangunan itu sendiri merupakan suatu konsep yang luas. (Mubyarto (1984) mengartikan partisipasi pembangunan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Bryant dan White dalam buku mereka berjudul "Managing Development" (1985) menjelaskan bahwa partisipasi sebagai bagian dari proses pembangunan merupakan suatu sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain; dan berarti pula perhatian yang mendalam mengenai perbedaan/perubahan yang akan dihasilkan oleh suatu pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya mereka menyimpulkan, bahwa partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan pembangunan.

Selanjutnya Taliziduhu Draha (1987) mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan fisik mental, emosi seseorang atau kelompok masyarakat desa di dalam gerakan pembangunan yang mendorong bersangkutan untuk kehendak atau prakarsa sendiri menurut kemampuan yang ada mengambil bagian dalam usaha penyelenggaraan suatu program atau proyek atau

kegiatan pembangunan desa yang bersangkutan dalam pertanggungjawabannya.

Dari pengertian tersebut di atas maka di bawah ini dikemukakan cakupan dari partisipasi masyarakat yaitu:

- Adanya keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan.
- Partisipasi merupakan kehendak sendiri atau prakarsa untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian pembangunan.
- Dalam partisipasi terlihat adanya unsur swadaya, serta terdapat adanya rasa tanggung jawab rasa pembangunan.

Dengan demikian tepat apabila dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam melibatkan diri secara langsung dalam program pembangunan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah wujud partisipasi dalam bentuk ide-ide atau pemikiran, ikut menjaga sarana dan prasarana yang mendukung program pembangunan dan bahan material lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan pembangunan.

Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1982) perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Pengklasifikasian jenis partisipasi.
2. Mewadahi partisipasi.
3. Menciptakan prasyarat partisipasi.

Pengklasifikasian partisipasi yang dimaksud adalah sumbangan apa yang diberikan oleh orang atau kelompok yang berpartisipasi. Sumbangan dan partisipasi ada beberapa jenis antara lain:

- a. Partisipasi buah pikiran yang disalurkan melalui rapat atau pertemuan-pertemuan.
- b. Partisipasi tenaga yang diberikan dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Partisipasi harta benda yang diberikan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan.
- d. Partisipasi keterampilan yaitu berupa keterampilan teknik yang diberikan untuk kepentingan aneka ragam industri.
- e. Partisipasi sosial, misalnya ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kumpulan tetangga, arisan, koperasi dan lain-lain.

Sedangkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat prasyarat partisipasi yang dirumuskan dalam bentuk keterlibatan langsung baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, menilai, dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dalam proses pembangunan desa, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran pembangunan. Sebagai masukan partisipasi dapat berfungsi dalam setiap fase pembangunan, mulai dari fase penerimaan informasi dan seterusnya hingga fase penerimaan dan penilaian hasil pembangunan. Ndraha Taliziduhu (1987) dalam kaitan ini mengutip beberapa pendapat para ahli sehubungan dengan partisipasi sebagai masukan pembangunan desa, antara lain meliputi fase-fase sebagai berikut :

- 1) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial (Rogers, 1969);
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi,

melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya (Evelyn Wood, 1962) ;

- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (Hofeteede, 1971, Cohen dan Uphoff, 1977), termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka (Mubyarto, 1984), dan partisipasi dalam desain proyek (Mosha dan Matte, 1979);
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan (Cohen dan Uphoff, 1977);
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, atau menurut Cohen dan Uphoff menamakannya participation in benefits (1977);
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan (Mosha dan Matte, 1979; Cohen dan Uphoff, 1977), yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (dalam Ndraha Taliziduhu, 1987).

Jadi, sebagai masukan pembangunan, partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam seluruh fase pembangunan desa, yang apabila diringkaskan dapat meliputi : partisipasi dalam penerimaan informasi, partisipasi dalam pemberian tanggapan terhadap informasi, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam penerimaan kembali hasil pembangunan, dan partisipasi dalam penilaian pembangunan. Dan jika keenam bentuk partisipasi tersebut dikonstruksikan secara logis, maka ternyata setiap bentuk partisipasi merupakan sekuen proses pembangunan suatu proyek pembangunan mulai dari bentuknya

sebagai gagasan sampai pada bentuknya sebagai bangunan. Dan seperti yang dikatakan oleh Ndraha Taliziduhu (1987) bahwa partisipasi yang dilakukan sepanjang proses tersebut disebut partisipasi profesional, sedangkan partisipasi hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase/bentuk saja dinamakan partisipasi parsial. Semakin profesional partisipasi masyarakat maka menunjukkan semakin besar tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan, dan semakin berhasil pula pembangunan desa.

Dari uraian singkat di atas dapatlah dikatakan bahwa semakin tergerakkan atau meningkat partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan yang termanifestasi dari keikutsertaan mereka pada fase-fase pembangunan, maka semakin menunjukkan berhasilnya pembangunan pedesaan atau pembangunan masyarakat pedesaan.

C. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pedesaan untuk Peningkatan Keberhasilan Pembangunan.

Sebagaimana telah disinggung pada uraian yang mendahului bahwa pembangunan yang semata-mata menekankan pada dimensi ekonomi (orientasi pada pertumbuhan) tidaklah cukup untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang memang multi kompleks.

Menyadari akan hal tersebut sehingga pembangunan yang menekankan pada sumber daya manusia (orientasi sumber daya manusia) menjadi semakin penting sebagai strategi alternatif yang menyertai pembangunan dibidang ekonomi. Adapun asumsi dasar dari pembangunan yang berorientasi pada sumber daya manusia ialah dengan peningkatan dalam sumber daya manusia (human faktor) akan memberikan kontribusi yang besar bagi

kemajuan/kenaikan laju pembangunan yaitu menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial.

Hidayat (1981) mengemukakan bahwa pendekatan pembangunan yang berorientasi sumber daya manusia karena hakekatnya adalah manusiawi, maka dalam mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan bukan berarti memberi prioritas kepada mereka yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi atau bukan kepada mereka yang telah produktif, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan segala kebinekaannya. Dan oleh karena itulah investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan physical capital stock, tetapi juga kepada human capital stock dengan mengambil prioritas pada usaha peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan gizi. Kalau kualitas sumber daya manusia pada aspek-aspek tersebut sudah dapat ditingkatkan maka masukan modal fisik dan teknologi (capital stock) baru akan terasa manfaatnya tanpa menimbulkan efek samping yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Berdasarkan konsep pengembangan sumber daya manusia serta konsep pembangunan orientasi sumber daya manusia itu sendiri, nampak bahwa aspek-aspek pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan ini akan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan laju pembangunan. Secara singkat pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kedua aspek tersebut serta hubungannya dengan peningkatan keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan di pedesaan akan diuraikan di bawah ini.

1. Aspek Pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan

Pendidikan menempati posisi sentral dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan oleh karena itu memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Sebagaimana digariskan dalam GBHN, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Disini terlihat betapa besar dan pentingnya peranan pendidikan dalam aspek kehidupan manusia.

Asumsi di atas jelas melihat pendidikan sebagai suatu aspek dinamis yang diharapkan kelak membawa perubahan dalam diri manusia kearah berpikir dan bertingkah laku yang maju. Berkaitan dengan hal tersebut Mohammad Amin (1992) dalam hubungan dengan peranan pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia mengemukakan bahwa pendidikan merupakan dorongan utama terhadap kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian, Simanjuntak (1981) mengemukakan bahwa pendidikan tidak saja berperan menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dan dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Lebih lanjut dikatakan oleh Simanjuntak (1981), perlunya perluasan pendidikan supaya disatu pihak dapat memperbesar tingkat pertumbuhan ekonomi, dan lain pihak dapat meningkatkan taraf hidup. Makin tinggi atau makin baik dan memadai kualitas pendidikan seseorang maka makin

meningkat pula keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Dengan meningkatkan produktivitas, seseorang cenderung akan dapat memperbaiki hidupnya.

Penelitian yang dilakukan Bank Dunia (1990) telah banyak mengkaji korelasi antara peningkatan kualitas pendidikan dengan kemampuan manusia dalam memperbaiki atau meningkatkan hidupnya. Dikatakan, petani yang kualitas pendidikannya lebih baik cenderung lebih inovatif dari pada petani yang tidak berpendidikan sama sekali. Hasil studi Bank Dunia ini membuktikan bahwa petani yang telah menyelesaikan 4 tahun dari pendidikan mereka suatu taraf minimum untuk mencapai tingkat melek huruf memproduksi kira-kira 8% lebih banyak dibandingkan petani yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Secara garis besar menurut studi Bank Dunia ini bahwa lamanya pendidikan memberi individu lebih banyak kesempatan untuk mencari alternatif pekerjaan yang sesuai (dalam Moeljarto & Sonia, 1997).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan adalah sangat penting dan menentukan laju keberhasilan pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan ini sangat penting untuk kepentingan pembangunan pedesaan mengingat kualitas pendidikan masyarakat pedesaan yang secara umum dapat dikatakan rendah.

Sehubungan dengan peranan pendidikan untuk pembangunan desa maka Internasional Council for Educational Development dalam laporannya kepada UNICEF (september 1973) mengemukakan bahwa kebutuhan –kebutuhan akan pendidikan dalam rangka pembangunan desa dikelompokkan atas 4 bagian utama sesuai dengan segi kegunaannya, yaitu : (1) Pendidikan dasar

atau umum; (2) Perbaiki pendidikan keluarga, dengan tujuan utamanya ialah untuk menanam pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang bermanfaat dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga seperti kesehatan, ilmu gizi kerumahtanggaan, dan perawatan anak, perbaikan rumah, keluarga berencana, dan sebagainya; (3) Perbaiki pendidikan masyarakat, yaitu dengan maksud untuk memperkuat lembaga-lembaga lokal, serta proses-proses melalui pengajaran berbagai hal seperti pemerintah lokal dan nasional, koperasi, proyek-proyek masyarakat, dan sebagainya; (4) Pendidikan yang berhubungan dengan pekerjaan, untuk mengembangkan pengetahuan khusus, keterampilan-keterampilan yang dihubungkan dengan berbagai macam kegiatan ekonomi dan yang berguna dalam pembinaan mata pencaharian.

Jadi, pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal seperti bimbingan penyuluhan pelatihan –pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Dengan melalui pendidikan formal maupun non formal ini akan meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, kecakapan mental dan lain sebagainya yang dapat merubah manusia baik tingkah lakunya, hidupnya dan lain-lain untuk menuju ke suatu kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain akan meningkatkan kemampuan manusia untuk membangun masa depan mereka ke arah yang lebih baik.

2. Aspek Kesehatan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan.

Aspek kedua yang menempati posisi sentral dalam mensejahterakan manusia ialah kualitas kesehatan. Oleh karena itu pengembangan kualitas

sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka keberhasilan pembangunan. Indikator yang sering digunakan dan berkaitan dengan status kesehatan, kepedulian dan kemampuan pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan antara lain angka kematian bayi, umur harapan hidup, melek huruf, penyediaan air bersih, biaya kesehatan dan pendapat perkapita.

Sebagaimana tercantum dalam GBHN, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Ini tidak berarti bahwa pembangunan itu hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Untuk mencapainya, dibutuhkan peningkatan kualitas manusia yang berkepribadian, manusia Indonesia yang berdedikasi tinggi terhadap pembangunan negaranya.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Baum dan Stokes (terjemahan, 1988) mengemukakan bahwa sakit dan kekurangan gizi dapat menghambat pembangunan terutama pembangunan ekonomi, karena kedua masalah ini dapat mengganggu produktivitas kerja karena menghalangi proses belajar pengembangan mental.

Banyak hasil penelitian mengemukakan bahwa produktivitas seseorang berkorelasi positif dengan tingkat kualitas kesehatan. Sebagai contoh, seorang anak yang mempunyai gizi yang baik akan meningkatkan kapasitas belajarnya. Seorang anak yang bergizi rendah akan mempunyai kinerja akademik yang buruk.

Dari pendapat ataupun contoh di atas dapat dilihat betapa pentingnya memberi investasi yang proporsional dalam bidang pengembangan kesehatan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu investasi yang dilakukan untuk perbaikan kesehatan dan gizi dipandang sebagai salah satu aspek dari human capital, seperti apa yang dikemukakan para ahli teori pembangunan pendekatan sumber daya manusia atau teori Human Capital (Simanjuntak, 1981).

Di daerah pedesaan masalah kualitas kesehatan ini masih sangat dirasakan oleh masyarakat umumnya. Kondisi-kualitas kesehatan masyarakat pedesaan yang umumnya masih rendah tersebut dapat menyebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk berproduktivitas yang tinggi untuk perbaikan kondisi hidup mereka, dan seterusnya turut mempengaruhi kemampuan mereka untuk ikut serta dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya manusia di pedesaan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan perlu dilakukan terus menerus. Seiring dengan pengembangan di bidang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia pada bidang kesehatan ini perlu didukung oleh berbagai kebijakan seperti peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemeliharaan kesehatan usia sekolah, program pemberantasan penyakit menular, program penyehatan lingkungan permukiman, program penyediaan air bersih dan sebagainya. Melalui berbagai kebijakan atau program-program tersebut diharapkan kualitas kesehatan masyarakat pedesaan dapat meningkat, sehingga produktivitas dapat meningkat dan dengan demikian akan lebih meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkembang secara mandiri.

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di muka dapatlah di kemukakan beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut :

- (1) Sumber daya manusia merupakan aspek utama yang menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat manapun, termasuk pembangunan di pedesaan. Sumber daya manusia dimasukkan dilihat dari segi kuantitas (jumlah) maupun segi kualitas (mutu) dari pada sumber daya manusia. Dari kedua aspek tersebut maka segi kualitaslah yang paling penting dan menentukan.
- (2) Pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam rangka keberhasilan pembangunan, maka pengembangan kualitas fisik maupun kualitas non fisik daripada sumber daya manusia sangat penting dilakukan.
- (3) Dua aspek utama dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Dua bidang ini dianggap paling penting karena hanya dengan memberi perhatian yang proporsional kepada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, produktivitas tenaga manusia (masyarakat) akan meningkat. Dengan peningkatan produktivitas, manusia cenderung akan dapat memperbaiki hidupnya atau lebih mampu membangun masa depan mereka ke arah yang lebih baik.
- (4) Kualitas sumber daya manusia di daerah pedesaan umumnya masih rendah, terutama dilihat dari kualitas pendidikan dan kesehatan. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia di pedesaan ini telah menyebabkan rendahnya produktivitas; dan

produktivitas yang rendah ini mengakibatkan lemahnya kemampuan mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itulah upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan khususnya di bidang kualitas pendidikan dan kesehatan sangat dibutuhkan atau perlu peningkatannya.

Di bidang peningkatan kualitas pendidikan, maka disamping melalui pendidikan formal, juga sangat diperlukan pendidikan non formal baik yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan khusus, maupun yang menyangkut pengembangan sikap dan mental, dan lain sebagainya yang dapat merubah di pedesaan (tingkah laku, hidupnya, dan lain-lain) untuk menuju ke suatu kehidupan yang lebih baik.

Di bidang peningkatan kualitas kesehatan perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, program penyehatan lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, dan lain-lain yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat desa untuk memperbaiki hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Baum, c. Weren dan Stokes Tolbert, 1988, **Investasi Dalam Pembangunan : Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia (terjemahan)**, Jakarta : UI Press.
- Bertha Nyoman, I. 1982, **Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Betten, T. R., 1979, **Pembangunan Masyarakat Desa (terjemahan)**, Bandung : Alumni.
- Bryant Coralie dan White Louise, 1985, **Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang (terjemahan)**, Jakarta : LP3ES.
- Hidayat, 1981, **Model Pembangunan Berdasarkan Pendekatan Sumber Daya Manusia**, Jakarta : Fakultas Ekonomi UI.
- Khairuddin, 1992. **Pembangunan Masyarakat**, Liberty Yogyakarta
- Moeljarto Vidhyandika dan Prabowo Sonia, "**Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Sosial**", dalam Majalah CSIS Tahun XXVI No.1 Januari-Februari 1997.
- Notoatmodjo Soekidjo, 1992, **Pengembangan Sumber Daya Manusia**, Jakarta : Rineka Cipta
- Sayogya Pudjiwati, 1987, **Garis Kemiskinan Dan Minimum Kebutuhan Pangan**, Makalah Dalam Kongres II HIPMI.
- Simanjuntak J. Pariyaman, 1981, **Perkembangan Teori Di Bidang Sumber Daya Manusia**, Jakarta : FE UI.
- Soeroto, 1986, **Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja**, Yogyakarta : UGM Press
- Suseno Djoko, 1985, **Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Nelayan**, Yogyakarta : UGM Press.
- Taliziduhu Ndraha, 1987, **Pembangunan Masyarakat**, Jakarta, Bina Aksara.

Taliziduhu Ndraha, 1990, **Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas**, Rineka Cipta, Jakarta.

Tjokroamidjojo Bintoro dan Mustopadidjaja, AR., 1982, **Teori Strategi Pembangunan Nasional**, Jakarta, Gunung Agung.

Tjokrowinoto Moeljarto, 1987, **Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi**, Yogyakarta : Tiara Press.

Todaro Michael, 1983, **Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga (terjemahan)**, Jakarta : LPFE Univ. Indonesia.

Sumber lain :

- *Garis-Garis Besar Haluan Negara* Tahun 1993.
- *Harian Kompas* Tanggal 28 April 1997.